

MODEL PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Dumairy

dumdumairy@yahoo.com

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

Syamsul Hadi

syamsulhadi@ugm.ac.id

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Muhammad

22jan.yassar@gmail.com

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STIES) Yogyakarta

Abstract

In conventional economics one will find a basic macroeconomic model formulated as $Y=C+I+G$. This basic model is a formulae for counting national income with expenditure approach. Economists and economic students are quite familiar with it. According to conventional economists, in any economy there are three sectors that spend expenditures and earn income; those are household, business, and the government sectors. Economic actors or agents in household sector are individuals or families. Actors in business sector consist of firms, companies, or corporations. The actor in the government sector is the central government as an institutional entity. In the aforementioned model C symbolizes expenditures spent by household sector, I reflects investment spending by business sector, while G represents the government expenditure. This article is the product of a research which reveals that the basic macroeconomic model $Y=C+I+G$ is less realistic. National income figures resulted from applying that model have been underestimated. Not only the model less realistic, underlying assumptions in building the model also are not Islamic. It is even worse that those assumptions have also been proven unfitted to the real world. Endowed with concepts in Islamic economics, this article provides a new model, a model that is not merely Islamic but more realistic as well. In the model being proposed here an additional economic sector is introduced, namely, social sector. Economic actors or agents in this sector consist of social organizations and non-profit institutions, a segment of community whose role and economic contributions have so far been neglected in conventional economics. Now in our presently proposed model, by recognizing them as a specific economic entity the new basic macroeconomic model is to be $Y="C"+"I"+G+A$.

Keywords: a model of counting, islamic economics, national income, macroeconomic.

ملخص

في مجال علم الاقتصاد التقليدي يوجد النمط الأساسي للاقتصاد الكلي وهو $Y=C+I+G$. هذا النمط شكل من أشكال النظريات في تعداد الدخل القومي بمقاربة المصروفات، وهو معروف جدا لدى خبراء وطلاب الاقتصاد. وقد نص علماء الاقتصاد على أن وكلاء الاقتصاد في دولة من الدول يتوزعون إلى ثلاثة قطاعات، وهي القطاع الخاص، والقطاع التجاري، والقطاع الحكومي. وكلاء الاقتصاد في القطاع الخاص يمثل لهم الأفراد والأسر، وفي القطاع التجاري الشركات والمصانع، وفي القطاع الحكومي الحكومة المركزية. في ذلك النمط، C رمز لمصروفات

القطاع الخاص ، و I رمز لمصرفات القطاع التجاري ، و G للقطاع الحكومي . تتناول هذه المقالة ذلك النمط الأساسي الذي يعتبر غير الواقعي في الاقتصاد الكلي ، وذلك لأن مبلغ العدد للدخل القومي المحصول من استخدام هذا النمط يعتبر قليلا ، بالإضافة إلا أنه ليس مبنيا على ضوابط الشريعة . استنادا إلى نظريات الاقتصاد الإسلامي ، يقدم هذا البحث نمطا جديدا متميزا بكونه واقعيًا وشرعيًا . ويضاف في هذا النمط الجديد قطاع داخلي رابع وهو القطاع الاجتماعي الذي يمثله منظمات اجتماعية ومؤسسات غير ربحية التي لم يزل دورها وإسهاماتها أهمه الاقتصاد التقليدي . وأصبح شكل هذا النمط الجديد مثل الآتي : $Y = "C" + "I" + G + A$

الكلمات المفتاحية : نمط التعداد، الاقتصاد الإسلامي، الدخل القومي، الاقتصاد الكلي .

Pendahuluan

Frasa atau istilah Pendapatan Nasional mengandung beberapa konotasi. Ia bisa berarti Produk Domestik Bruto atau PDB (*Gross Domestic Product, GDP*), bisa juga bermakna Produk Nasional Bruto atau PNB (*Gross National Product, GNP*). Ia dapat pula berarti *National Income (NI)*, yang memang merupakan terjemahan dari Pendapatan Nasional. PDB (*GDP*), PNB (*GNP*), dan *NI* merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk menilai prestasi tahunan perekonomian sebuah negara. Di samping ketiga ukuran ini masih terdapat beberapa ukuran lain untuk menilai prestasi ekonomi sebuah negara. Orang awam pada umumnya tidak tahu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan pendapatan nasional di dalam sebuah artikel, berita, atau karangan; apakah pendapatan nasional di situ maksudnya *GDP*, atau *GNP*, ataukah *NI*.

Tidak demikian halnya dengan orang yang pernah dan sedang belajar ilmu ekonomi. Ketika membaca tulisan atau mendengar berita tentang pendapatan nasional ia akan bertanya-tanya, ingin mendapat kepastian, apa yang dimaksud dengan 'pendapatan nasional' di dalam konteks artikel atau berita tersebut. Hal ini mengingatkan iadapat berarti khusus, yaitu sebagai terjemahan dari *NI*; atau berarti umum, yakni salah satu dari *GDP*, *GNP*, dan *NI*. Tafsir ganda semacam ini mirip dengan kata 'aqua' dalam kehidupan sehari-hari. Sebutan 'aqua' bisa berarti

khusus yakni air minum kemasan dengan merek tersebut, atau bermakna umum yaitu segala merek air minum kemasan.

Lintasan Sejarah

Pendapatan nasional—baik dalam arti khusus maupun arti umum—lazim dilambangkan dengan huruf *Y*. Perhitungan (lebih tepatnya penaksiran) pendapatan nasional pertama kali dilakukan di Inggris pada tahun 1665 oleh Sir William Petty. Hasilnya ia sajikan di dalam makalah berjudul "Verbum Sapienti", tidak diterbitkan (Kendrick, 2008). Ketika itu Petty menamakannya "Pendapatan Masyarakat" (*income of the people*), yang merupakan penjumlahan dari nilai upah yang diterima oleh masyarakat dalam setahun dan nilai pendapatan yang diterima oleh negara dalam setahun. Yang disebut terakhir ini bersumber dari perolehan sewa, bunga, dan keuntungan perusahaan negara. Karena disajikan dalam bentuk akuntansi lema-ganda (*double-entry accounting*), pendapatan masyarakat sekaligus juga merupakan pengeluaran masyarakat, yaitu pengeluaran konsumsi masyarakat dan surplus pendapatan yang tidak dikonsumsi. Dengan kata lain, pendapatan masyarakat yang ditaksir oleh Petty saat itu sudah memakai pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Penaksiran yang lebih sistematis dikerjakan oleh Gregory King pada tahun 1696. King menambahkan nilai investasi

(*yearly increase of wealth*) sebagai salah satu unsur pendapatan nasional.

Perancis adalah negara kedua yang menghitung pendapatan nasional, dirintis pertama kali oleh Pierre le Pesant de Boisguillebert pada tahun 1690an. Pada awal tahun 1700an Marshall Vauban menyempurnakan perhitungan dengan perluasan cakupan. Menjelang akhir abad ke-18 Francois Quesnay dan sejumlah fisiokrat merintis perhitungan pendapatan nasional Perancis dengan pendekatan produksi. Rintisannya dilanjutkan oleh Lavoisier dan kemudian disajikan dalam bentuk tabel ekonomi (*tableau economique*), yang mengilhami terbentuknya *input-output analysis* (Kendrick, 2008). Rusia dan Amerika Serikat merupakan negara ketiga dan keempat. Penaksiran pendapatan nasional Rusia dirintis oleh BFG Hermann dan AN Radishchev sekitar akhir abad ke-18. Penaksiran di Amerika Serikat sudah dirintis sejak tahun 1843 oleh George Tucker dari University of Virginia. Namun penaksiran yang lebih saksama baru dilakukan pada awal dasawarsa 1930an oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Simon Kuznets.

Sampai dengan sebelum Perang Dunia I berakhir tercatat ada 13 negara yang menghitung pendapatan nasionalnya. Di sepanjang kurun antara dua Perang Dunia negara yang menghitung atau menaksir pendapatan nasional bertambah secara signifikan, dari 13 negara pada tahun 1919 menjadi 33 negara pada tahun 1939. Jumlah ini meningkat pesat menjadi 93 negara selama dasawarsa pertama sesudah perang. Minat besar negara-negara untuk menghitung pendapatan nasional dipicu antara lain oleh tiga hal. Pertama, terbitnya "The General Theory" Keynes yang mengenalkan teori tentang penentuan pendapatan nasional. Kedua, terbitnya "Measurement of National Income and the Construction of Social Accounts" oleh Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*) pada tahun 1947 (Kendrick, 2008). Liga Bangsa-Bangsa kemudian bermetamorfosa menjadi

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, *United Nations*). Ketiga, terbentuknya *International Association for Research in Income and Wealth* pada tahun 1947.

Di samping semua itu, pada tahun 1953 PBB menerbitkan "A System of National Accounts and Supporting Tables" (biasa disingkat *SNA*), dan dibagikan kepada negara-negara anggotanya. Sejak tahun 1968 *SNA* versi perbaikan menjadi acuan perhitungan pendapatan yang memungkinkan perbandingan antarnegara. Konsep *SNA* senantiasa diperbaiki menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, transaksi keuangan dan teknologi. *SNA* terbaru yang sekarang digunakan adalah *SNA 2008* (EC *et al*, 2009).

Negara pertama yang menghitung pendapatan nasional dengan konsep Produk Nasional Bruto adalah Amerika Serikat, dikenalkan kepada publik pada tahun 1942. Negara ini baru menyajikan pendapatan nasional dengan konsep Produk Domestik Bruto pada tahun 1991. Selain mengacu pada *SNA*, Amerika Serikat memiliki acuan sendiri berjudul "National Income and Product Accounts of the U.S.", biasa disingkat *NIPA*. Negara-negara Eropa juga mempunyai pedoman sendiri dengan nama "European System of Accounts", disingkat *ESA*. Seperti halnya *SNA* dan *NIPA*, *ESA* juga selalu disempurnakan. *ESA* terbaru yang kini diacu oleh negara-negara Eropa adalah *ESA 2010* (Eurostat, 2013). Dewasa ini semua negara di bumi menghitung pendapatan nasionalnya, terutama dengan konsep *PDB*, sehingga kinerja ekonomi antarnegara bisa dibandingkan. Perhitungan pendapatan nasional di Indonesia mengacu pada *SNA 2008*.

Metode Penghitungan

Pendapatan nasional (*Y*) dapat dihitung dengan tiga macam pendekatan atau metoda yaitu metoda produksi, metoda pendapatan, dan metoda pengeluaran. Dalam pendekatan produksi, pendapatan nasional adalah jumlah nilai

tambah produk (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi di sebuah negara. Dalam kaitan ini, perekonomian dikelompokkan secara garis besar menjadi beberapa sektor ekonomi atau lapangan usaha. Jumlah sektor ekonomi atau lapangan usaha untuk keperluan penghitungan pendapatan nasional ini bervariasi antarnegara, bahkan antarwaktu di satu negara yang sama.

Dalam metoda pendapatan, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor di dalam perekonomian sebuah negara. Untuk konteks ini, perekonomian digolong-golongkan menjadi empat sektor penerima pendapatan. Keempat sektor dimaksud adalah sektor rumah tangga (*household sector*), sektor bisnis atau perusahaan (*business sector*), sektor pemerintah (*the central government sector*), serta sektor perdagangan dengan pihak luar negeri (*foreign trade sector*). Dalam metoda pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang dibelanjakan oleh seluruh sektor di dalam perekonomian. Dalam kaitan ini, perekonomian dikelompokkan menjadi empat sektor yang sama seperti pensektoran dalam metoda pendapatan.

Hasil perhitungan pendapatan nasional berdasarkan ketiga metoda tadi secara teoretis akan menghasilkan angka yang sama, untuk negara yang sama pada tahun yang sama. Kalaupun terdapat perbedaan, biasanya nilainya relatif kecil atau tidak material. Di antara ketiga metoda perhitungan, yang paling lazim digunakan dan disajikan oleh negara-negara di dunia adalah perhitungan dengan metoda atau pendekatan pengeluaran. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran berakar dari salah satu "kitab kuning" ilmu ekonomi, yaitu "The General Theory of Employment, Interest, and Money" karya John Maynard Keynes. Berdasarkan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*), pendapatan nasional (Y)

adalah jumlah nilai pengeluaran yang dibelanjakan oleh sektor-sektor rumah tangga, bisnis, dan pemerintah; serta sektor perdagangan luar negeri jika perekonomian bersifat terbuka, yakni terdapat kegiatan ekspor (X) dan impor (M).

Pelaku ekonomi di sektor rumah tangga adalah orang perorangan atau rumah tangga-rumah tangga. Pelaku di sektor bisnis adalah perusahaan-perusahaan. Adapun pelaku di sektor pemerintah ialah pemerintah pusat negara yang bersangkutan. Pengeluaran agregat sektor rumah tangga tercermin dari pengeluaran konsumsi masyarakat atau penduduk, yakni bagian dari pendapatan yang tidak ditabung. Pengeluaran agregat sektor rumah tangga dilambangkan dengan huruf C , inisial dari *Consumption expenditure*. Pengeluaran agregat sektor bisnis diwakili oleh nilai investasi yang dibelanjakan oleh perusahaan-perusahaan (*Investment expenditure*), dilambangkan dengan I . Pengeluaran agregat sektor pemerintah maksudnya ialah belanja rutin pemerintah (*Government expenditure*), diisyaratkan dengan G . Dengan demikian, pendapatan nasional (Y) berdasarkan pendekatan pengeluaran dapat dirumuskan sebagai:

$$Y = C + I + G \quad [01]$$

Dalam rumusan [01] ini tersirat bahwa perekonomian negara bersifat tertutup, tidak ada hubungan ekonomi dengan pihak luar negeri atau negara lain. Apabila perekonomian bersifat terbuka, terdapat ekspor (X) dan impor (M), maka rumus perhitungan Y menjadi

$$Y = C + I + G + (X - M) \quad [02]$$

Rumusan [01] dan [02] merupakan 'model dasar' makroekonomi. Model dasar tersebut sangat populer di kalangan para ekonom dan mahasiswa ekonomi. Akademisi, peneliti, dan pengambil keputusan jajaran pemerintahan menggunakannya sebagai alat analisis dan landasan kebijakan makroekonomi. Popularitas model dasar itu tidak hanya di khsanah ilmu ekonomi konvensional, tapi juga di khsanah ilmu

ekonomi Islam. Teoretisi dan praktisi ekonomi Islam pun menganalisis perekonomian pada tataran (*level*) makro dengan model dasar tersebut.

Model dasar $Y=C+I+G$ menunjukkan keseimbangan antara permintaan agregat dan penawaran agregat. Pengeluaran konsumsi sektor rumah tangga (C) mencerminkan nilai segala macam barang dan jasa yang diminta oleh (*demanded by*) penduduk sebuah negeri. Pengeluaran investasi oleh sektor bisnis (I) sama maknanya dengan nilai barang dan jasa yang diminta oleh perusahaan-perusahaan. Adapun G mencerminkan nilai segala macam barang dan jasa yang diminta oleh pemerintah. Ruas kanan model ini ($C+I+G$) yang merupakan jumlah pengeluaran agregat tak lain adalah nilai permintaan agregat, yaitu nilai permintaan akan segala macam barang dan jasa oleh semua sektor di sebuah negara. Sementara sisi kiri model (yaitu Y) mencerminkan nilai penawaran agregat, nilai segala macam barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok oleh semua sektor di sebuah negara.

Alur Pendapatan-Pengeluaran

Terbentuknya rumus perhitungan pendapatan nasional atau model dasar $Y=C+I+G$ dapat diterangkan dengan konsep akuntansi sederhana, yakni melalui 'alur pendapatan-pengeluaran' di antara *akun-T* sektor-sektor ekonomi di dalam sebuah negara. Akun-T di sini maksudnya ialah neraca ringkas yang menggambarkan sumber-sumber pendapatan dan alokasi penggunaannya. Mengingat pelaku ekonomi dalam negeri terdiri atas tiga sektor, maka secara akuntansi terdapat tiga akun-T sektoral dalam perekonomian sebuah negara. Ayat-ayat pendapatan dan pengeluaran pada neraca setiap sektor merujuk ke perilaku permintaan oleh sektor yang bersangkutan, perilaku masing-masing C dan I serta G .

Perilaku permintaan akan segala macam barang dan jasa oleh sektor rumah tangga, dengan kata lain pengeluaran

konsumsi sektor rumah tangga, menurut teori makroekonomi ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan disposabel mereka.

$$C = C_o + c.Y_d \quad [03]$$

dalam hal ini: $C_o > 0$ dan $1 > c \equiv MPC = \Delta C / \Delta Y_d > 0$ [04]

Konstanta C_o adalah pengeluaran konsumsi otonom, yaitu besarnya pengeluaran konsumsi yang tidak dipengaruhi oleh (tidak bergantung pada, bukan merupakan fungsi dari) pendapatan disposabel. Koefisien c disebut *Marginal Propensity to Consume (MPC)*, merupakan nisbah perubahan pengeluaran konsumsi terhadap perubahan pendapatan disposabel, $c \equiv MPC = \Delta C / \Delta Y_d$. Pendapatan disposabel ialah pendapatan neto yang dapat dipakai atau dibelanjakan oleh penduduk suatu negara, yaitu pendapatan total atau pendapatan nasional (Y) dikurangi pajak-pajak yang dibayarkan (T_x) dan ditambah pembayaran transfer dari pemerintah kepada lapisan tertentu penduduk (T_p).

$$Y_d = Y - T_x + T_p \quad [05]$$

Sebagian pendapatan disposabel (Y_d) ini digunakan untuk membayar pengeluaran konsumtif (C), sebagian lagi disimpan menjadi tabungan (S , *savings*). Jadi,

$$Y_d = C + S \quad [06]$$

Y_d dalam kesamaan [05] adalah Y_d berdasarkan sumbernya, sedangkan Y_d dalam kesamaan [06] adalah Y_d menurut alokasi penggunaannya. Berdasarkan [06] maka $S = Y_d - C$. Dari sini, dengan menyubstitusi C dari kesamaan [03], dapat dibentuk persamaan tabungan masyarakat yaitu

$$S = -C_o + (1-c).Y_d \quad [07]$$

$$\text{atau } S = S_o + s.Y_d \quad [08]$$

dalam hal ini: $S_o = -C_o$ dan $s = 1-c$ [09]

Bertolak dari kesamaan sumber pembentukan pendapatan disposabel [05] dan kesamaan alokasi penggunaannya [06], dapat dibentuk sebuah akun-T yang menunjukkan alur atau aliran pendapatan dan pengeluaran sektor rumah tangga. Tabel 1 memperlihatkan akun-T dimaksud.

Tabel 1 Akun-T Sektor Rumah Tangga

Pendapatan		Pengeluaran	
Pendapatan awal-total	Y	Pajak-pajak yang dibayarkan	Tx
Pembayaran transfer diterima	Tp	Pengeluaran konsumsi	C
		Tabungan (<i>Savings</i>)	S

Tabungan disimpan di bank, kemudian oleh bank dipinjamkan kepada para investor atau bisniswan. Tabungan (S) merupakan sumber dana investasi (I). Jadi, melalui lembaga perbankan, S sebagai sumber dana menjelma menjadi I

sebagai penggunaan dana. Pada perekonomian yang dalam keadaan seimbang $S=I$. Tabel 2 menggambarkan alur pendapatan-pengeluaran di sektor bisnis.

Tabel 2 Akun-T Sektor Bisnis

Pendapatan		Pengeluaran	
Tabungan (<i>Savings</i>)	S	Pengeluaran investasi	I

Pajak-pajak yang dibayarkan oleh masyarakat (Tx) menjadi sumber utama pendapatan pemerintah. Sebagian besar penerimaan pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran konsumsi rutin

pemerintah (G).Sebagian lagi ditransfer-balik kepada masyarakat berupa pembayaran alihan (Tp).Tabel 3 menunjukkan alur pendapatan-pengeluaran pemerintah.

Tabel 3 Akun-T Sektor Pemerintah

Pendapatan		Pengeluaran	
Penerimaan pajak	Tx	Pengeluaran konsumsi rutin	G
		Pembayaran transfer	Tp

Bertolak dari tiga neraca sektoral di atas, maka pendapatan total yang diterima oleh semua sektor di suatu negara ('pendapatan total senegara') ialah jumlah pendapatan dari ayat-ayat yang terletak di sisi kiri akun-akun sektoral tersebut, yaitu

$$\text{Pendapatan total senegara} = Y + Tp + S + Tx \quad [10]$$

Di lain pihak, jumlah pengeluaran dari ayat-ayat yang terletak di sisi kanan merupakan 'pengeluaran total senegara'.
 Pengeluaran total senegara = $Tx + C + S + I + G + Tp$ [11]

Mengingat pendapatan pada dasarnya juga adalah pengeluaran (bergantung dari sisi siapa atau pihak mana kita melihat), maka pendapatan total senegara akan sama dengan pengeluaran total senegara. Jadi, [10]=[11].

$$Y + Tp + S + Tx = Tx + C + S + I + G + Tp \quad [12]$$

dan tersederhanakan menjadi

$$Y = C + I + G \quad [13]$$

Dari ketiga akun-Tsektoral yang ada, yang bermuara ke rumusan [13], tidak terlihat keberadaan organisasi sosial dan lembaga nirlaba. Pengeluaran yang mereka belanjakan untuk melayani masyarakat digabungkan ke dalam pengeluaran sektor rumah tangga. Penggabungan atau "penitipan" ini mengisyaratkan "pengakuan setengah hati" terhadap organisasi sosial dan lembaga nirlaba. Peranan ekonomi mereka diakui, akan tetapi keberadaannya sebagai sebagai sebuah entitas (sektor ekonomi) tersendiri belum diterima.

Signifikansi Sektor Sosial

Keberadaan dan peran sektor sosial tidak layak dipandang dengan sebelah mata. Bukan saja karena sektor ini memberdayakan masyarakat yang dilayani dan menghidupi orang-orang yang bergabung untuk berkiprah

bersamanya. Akan tetapi juga karena setiap orang pada dasarnya teranugerahi sifat kepedulian sosial. Ujud kepedulian sosial itu mulai dari sekadar menunjukkan simpati, menolong dengan perbuatan, mencegah orang lain dari kegiatan negatif dan sakwasangka, memberi bantuan materi, bekerja sukarela, hingga sekaliber—kalau perlu—mengorbankan diri sendiri demi keselamatan orang lain. Manusia tidak selalu bersifat *selfish* sebagaimana diasumsikan oleh teori ekonomi. Bahkan, menurut Rabin (2002), semakin besar pengorbanan yang harus diberikan untuk menolong orang lain semakin besar hasrat untuk menolongnya.

Dalam kehidupan yang semakin kompleks kini kehadiran sektor sosial—dengan organisasi sosial dan lembaga nirlaba selaku aktornya—kian diperlukan. Orang-orang yang super sibuk membutuhkannya sebagai perantara penyaluran dermanya; baik zakat, infaq, maupun sumbangan lain. Sejumlah dermawan juga lebih suka jika pihak penerima derma tidak mengetahui siapa pemberi derma, agar tidak menimbulkan rasa inferior atau rendah diri pihak penerima. Penyaluran derma melalui pihak ketiga—termasuk zakat—juga memungkinkan dan derma atau zakat terdistribusi lebih baik, efektif dan efisien. Sangatlah naif jika aktor-aktor di sektor sosial tidak beroleh pengakuan yang setara dengan pengakuan terhadap aktor-aktor di sektor lain. Sektor sosial bukan sekadar media atau sarana penyaluran dana pengeluaran sosial. Sebagian mereka bahkan berkarya mandiri. Mereka juga menjadi wahana para sukarelawan yang hendak mengabdikan pada masyarakat. Dalam banyak kasus, organisasi sosial dan lembaga nirlaba juga menjadi ajang orang-orang muda untuk membentuk kepribadian dan memantapkan jati diri.

Keberadaan sektor sosial adalah fakta. Nilai ekonomi yang diciptakannya niscaya tidak remeh. Andaikata nilai ekonomi mereka turut diperhitungkan, angka pendapatan nasional pastilah menjadi lebih besar. Dengan kata lain,

pendapatan nasional negara-negara di dunia selama ini sebetulnya kekecilan sebab sumbangsih sektor sosial tidak turut dihitung. Padahal organisasi sosial dan lembaga nirlaba terdapat di seantero setiap negara. Sebagai contoh: di Perancis, pada tahun 2008 terdapat lebih dari satu juta lembaga nirlaba (dalam nomenklatur Perancis disebut *associations*). Lembaga-lembaga nirlaba ini mempekerjakan 1,6 juta orang pekerja berbayar, dan 8 juta orang pekerja sukarela. Sekitar 16 juta orang penduduk Perancis berusia di atas 16 tahun (sepertiga jumlah penduduk dengan usia tersebut) merupakan anggota lembaga nirlaba. Di Jepang, pada tahun 2011 tercatat 41.600 unit lembaga nirlaba (*WikipediA*, 5 Juni 2018).

Di Amerika Serikat pada tahun 2014 terdaftar lebih dari 1,5 juta organisasi nirlaba. Dana sumbangan yang mengalir ke mereka ditaksir mencapai US\$358,58 miliar, meningkat 7,1% dari taksiran tahun 2013. Sepertiga dana itu mengalir ke organisasi keagamaan, 15% ke lembaga-lembaga pendidikan, 12% ke lembaga layanan kemanusiaan, dan 40% selebihnya ke berbagai macam organisasi nirlaba. Organisasi-organisasi nirlaba ini menyumbang sekitar 10% PDB AS. Sepanjang kurun 2010–2014 sekitar 25% penduduk berusia di atas 16 tahun bekerja sukarela untuk organisasi nirlaba. Tujuh dari 10 orang Amerika menyumbang ke setidaknya-tidaknya satu organisasi nirlaba. Sasaran donasi yang paling disukai oleh orang Amerika ialah organisasi keagamaan (*Wikipedia*, 5 Juni 2018).

Pengeluaran sosial adalah pengejawantahan kepedulian seseorang terhadap orang lain, kepedulian suatu pihak terhadap pihak lain. Islam sudah mengatur dan menuntun urusan ini dengan jelas-tegas melalui kewajiban berzakat bagi orang-orang yang memenuhi syarat harus berzakat, serta atas harta kekayaan tertentu yang telah memenuhi nishab. Di samping itu, Islam juga menganjurkan ummatnya untuk

bersedekah dan berinfaq. Anjuran ini berlaku bagi setiap muslim, tanpa memandang tingkat kemampuan ekonomi. Bahkan tidak memandang situasi sesaat apakah sedang lapang rezeki atau sedang sempit rezeki. Anjuran tanpa syarat ini, dan secara hukum berkedudukan *sunnah*, mengisyaratkan betapa ummat Islam senantiasa harus memiliki kepedulian terhadap orang lain, harus sedapat mungkin menolong orang lain, sebab sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan demikian, setiap muslim semestinya memiliki kepedulian sosial! Setiap muslim seharusnya terlekatati sifat kedermawanan, selalu tergerak untuk menolong orang lain.

Menolong orang lain bukan hanya mendatangkan manfaat bagi orang yang ditolong, tapi juga membuahkan kebahagiaan tersendiri bagi pihak yang menolong. Sebuah studi terhadap 600 orang mahasiswa di Amerika Utara (AS dan Kanada) menunjukkan bahwa mahasiswa yang menyumbangkan sebagian rezekinya kepada orang lain terdeteksi lebih bahagia dibandingkan dengan yang menghabiskannya untuk diri sendiri (Dunn, Akin & Norton, 2008 dalam Akin, dkk, 2010). Studi lain yang lebih “spektakuler”—dengan responden sebanyak 234.917 orang dewasa di 136 negara, sepanjang kurun 2006-2008—menunjukkan bahwa di 122 dari 136 negara terdapat hubungan positif antara pengeluaran sosial (pemberian donasi) dengan kenyamanan hidup penyumbang. Di negara yang berpendapatan lebih tinggi lebih banyak orang yang menyumbang. Sebagai perbandingan ekstrim: 66% responden di Kanada menyumbang, sementara di Uganda hanya 13% (Akin, dkk, 2010). Penelitian lain menemukan bahwa tingkat pendapatan merupakan variabel penentu mengapa dan seberapa orang menyumbang. Orang yang berpendapatan lebih tinggi memberikan sumbangan lebih besar. Temuan terakhir ini valid baik di aras mikro yang sampelnya rumah tangga, maupun di aras

makro dengan sampel negara-negara bagian di Amerika Serikat (Çokgezan, 2017). Sebuah survey ringan terhadap 4.000 responden di Inggris pada tahun 2013 melaporkan bahwa, dalam hal jumlah uang yang disumbangkan, orang Islam menyumbang lebih banyak daripada penganut agama lain. Setiap orang Islam menyumbang rata-rata £371 per tahun, orang Yahudi £270, orang-orang beragama lain lebih rendah lagi (Gledhill, 2013 dalam Çokgezan, 2017).

Eratnya keterkaitan fenomena sosial dengan kegiatan ekonomi merupakan isyarat bahwa sektor sosial tidak layak diabaikan dalam pencatatan ekonomi. Akan tetapi signifikansi peran sektor sosial, yang para pelakunya terdiri atas organisasi-organisasi sosial dan lembaga-lembaga nirlaba, tidak turut diperhitungkan dalam telaah-telaah ekonomi. Model dasar makroekonomi dalam khasanah ilmu ekonomi konvensional memarginalkan mereka.

Model Pendapatan Nasional Islami

Pengabaian sumbangsih-ekonomi sektor-sosial merupakan “cacat akademis” model dasar makroekonomi konvensional. Perhitungan pendapatan nasional menjadi kurang realitas, hasil hitungan menjadi kekecilan (*under-estimated*). Ilmu ekonomi konvensional telah memarginalkan satu segmen masyarakat. Ilmu ekonomi islami, melalui artikel ini, menawarkan model dasar makroekonomi (rumusan perhitungan pendapatan nasional) yang lebih realistis. Sebuah model yang tidak mengabaikan segmen tertentu masyarakat. Pelaku ekonomi di dalam negeri bukan hanya tiga tetapi empat sektor. Sektor keempat adalah sektor sosial.

Model rancangan di sini bukan sekadar berunsurkan empat akun-T, tetapi juga jabaran-jabaran akun-T yang lebih terinci. Alokasi pendapatan (Y) sektor rumah tangga bukan hanya sebatas untuk pembayaran pajak, pengeluaran konsumsi, dan tabungan; akan tetapi juga untuk

zakat dan pengeluaran sosial (lihat Tabel 4: Akun-T Sektor Rumah Tangga). Dana zakat yang dibayarkan oleh sektor rumah tangga mengalir ke penerimanya (*mustahiq*) melalui lembaga amil zakat,

merupakan penerimaan bagi sektor sosial. Begitu juga pengeluaran sosial sektor rumah tangga, disumbangkan kepada organisasi sosial atau lembaga nirlaba.

Tabel 4 Akun-T Sektor Rumah Tangga

Pendapatan		Pengeluaran	
Pendapatan total	Y	Setoran zakat	Z
		Setoran pajak	TR
		Pengeluaran konsumsi	C
		Tabungan (<i>Savings</i>)	S
		Pengeluaran Sosial	PSR

Catatan: TR = pajak perorangan, PSR = *Personal Social Responsibility*

Sumber dana atau pendapatan sektor bisnis tidak hanya tabungan (S) dari sektor rumah tangga, tetapi juga dari laba usaha mereka (L). Dengan dana total sebesar $S+L$ perusahaan-perusahaan membiayai investasi, membayar pajak, membelanjakan untuk *CSR*, dan sebagian laba dibagikan sebagai dividen atau ditahan (simak Tabel 5: Akun-T Sektor

Bisnis). Pendapatan pemerintah bersumber dari pajak-pajak perorangan yang disetorkan oleh sektor rumah tangga (TR) dan pajak setoran perusahaan-perusahaan (TB). Dengan dana pajak tersebut pemerintah membiayai pengeluaran-pengeluaran rutinnya (Tabel 6: Akun-T Sektor Pemerintah).

Tabel 5 Akun-T Sektor Bisnis

Pendapatan		Pengeluaran	
Tabungan	S	Pembiayaan investasi	I
Laba usaha	L	Setoran pajak	TB
		Belanja <i>CSR</i>	CSR
		Laba dibagikan/ditahan	D

Tabel 6 Akun-T Sektor Pemerintah

Pendapatan		Pengeluaran	
Setoran pajak dari rumah tangga	TR	Belanja rutin	G
Setoran pajak dari perusahaan	TB		

Catatan: TR = pajak perorangan dari sektor rumah tangga, TB = pajak dari sektor bisnis

Pendapatan sektor sosial bersumber dari dana zakat, sumbangan sosial perorangan, dan sumbangan sosial perusahaan (Tabel 7: Akun-T Sektor Sosial). Berbekal dana tersebut organisasi sosial dan lembaga-lembaga nirlaba

membiayai pengeluaran rutin (SRE) mereka. Sebagian dana mereka gunakan untuk belanja investasi (SI) seperti penambahan fasilitas fisik dan perbaikan sarana dan prasarana.

Tabel 7 Akun-T Sektor Sosial

Pendapatan		Pengeluaran	
Dana zakat titipan	Z	Belanja operasional rutin	SRE
Sumbangan sosial perorangan	PSR	Belanja investasi	SI
Sumbangan sosial perusahaan	CSR		

Catatan: *PSR = Personal Social Responsibility, CSR = Corporate Social Responsibility, SRE = Social Routine Expenditure, SI = Social Investment.*

Ayat-ayat sebelah kiri dari Tabel 4 hingga Tabel 7 merupakan unsur-unsur pendapatan senegara, sementara ayat-ayat di sisi kanan merupakan unsur-unsur pengeluaran senegara. Berdasarkan ayat-ayat tersebut maka

$$\text{Pendapatan total senegara} = Y + S + L + TR + TB + PSR + CSR + Z \quad [14]$$

$$\text{Pengeluaran total senegara} = Z + TR + C + S + PSR + I + TB + CSR + D + G + SRE + SI \quad [15]$$

Mengingat pengeluaran oleh suatu pihak pada dasarnya tidak lain adalah pendapatan bagi pihak lain yang menjadi mitra transaksi, maka di dalam lingkup sebuah negara pendapatan total akan sama dengan pengeluaran total. Dengan kata lain, [14]=[15].

$$Y + S + L + TR + TB + PSR + CSR + Z = Z + TR + C + S + PSR + I + TB + CSR + D + G + SRE + SI \quad [16]$$

dan dapat disederhanakan menjadi

$$Y + L = C + I + D + G + SRE + SI \quad [17]$$

Dengan memindahkan variabel *L* ke ruas kanan, kesamaan [17] bisa ditulis ulang menjadi

$$Y = C + I + D - L + G + SRE + SI \quad [18]$$

$$Y = C + (I + D - L) + G + (SRE + SI) \quad [19]$$

(*I+D-L*) mencerminkan pengeluaran total sektor bisnis, yakni gabungan atau penjumlahan pengeluaran investasi dan pengeluaran operasional perusahaan, bukan hanya pengeluaran investasi seperti yang ditemukan dalam model dasar makroekonomi konvensional. (*SRE+SI*) adalah pengeluaran total sektor sosial, meliputi pengeluaran rutin dan investasi sektor tersebut. *C* adalah pengeluaran konsumsi sektor rumah tangga. Meskipun berlambang sama dan bermakna serupa, *C* dalam [19] tidak sepenuhnya sama seperti *C* dalam [01] atau [13], sebab asal-usul perolehannya

berbeda. Namun demikian, *C* dalam [19] ini masih beralasan disebut pengeluaran sektor rumah tangga, sepanjang tidak ditafsirkan sama persis dengan *C* dalam model-model konvensional. Dalam rumusan model [19] hanya *G* yang layak dinyatakan samapersis dengan variabel berlambang serupa dalam model makroekonomi konvensional.

Y dalam [19] tidak lain adalah jumlah pengeluaran empat sektor pelaku ekonomi dalam negeri. Dengan memberikan sebutan dan lambang baru kepada pengeluaran keempat sektor tersebut menjadi sebagai berikut:

C sebagai *Household Expenditures* (disingkat *HE*) [20]

(*I+D-L*) sebagai *Business Expenditures* (disingkat *BE*) [21]

G sebagai *Government Expenditures* (disingkat *GE*) [22]

(*SRE+SI*) sebagai *Social Expenditures* (disingkat *SE*) [23]

maka rumusan [19] tadi dapat ditulis ulang menjadi

$$Y = HE + BE + GE + SE \quad [24]$$

Notasi [24] dapat dinyatakan dengan menggunakan lambang-lambang yang selama ini sudah lazim di ranah makroekonomi. *HE* berganti lambang menjadi "*C*", *BE* berubah simbol menjadi "*I*". Pembubuhan tanda kutip ("") pada kedua lambang ini mengisyaratkan bahwa mereka tidak sama persis dengan lambang serupa yang ada selama ini. *GE* dapat diganti dengan *G* saja, tanpa memerlukan tanda kutip karena memang sama persis dengan *G* di dalam model-model yang sudah dikenal selama ini. Terakhir, *SE* diganti dengan *A*; maknanya sama yaitu *Altruistic expenditures*. Dengan penyesuaian-penyesuaian ini rumusan model [24] dapat juga ditulis sebagai

$$Y = "C" + "I" + G + A \quad [25]$$

Model usulan ini, yakni rumusan [24] atau [25], bukan sekadar

menambahkan satu sektor pelaku ekonomi dalam negeri. Model ini juga dapat menilai kadar keerasan sosial masyarakat atau kadar kesosialan perekonomian sebuah negeri, yakni dengan mengamati perkembangan sumbangsih (*contribution*) sektor A dalam membentuk Y. Apabila tahun demi tahun sumbangsih A dalam Y semakin besar, maka berarti dari waktu ke waktu kadar kesosialan perekonomian tinggi, kesosialan masyarakat semakin erat. Lebih lanjut dapat pula ditelaah siapa yang paling berperan dalam mengeratkan kehidupan sosial tersebut, yakni dengan menyingkap anatomi akun-T sektor sosial.

Pendapatan sektor sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 7, berasal dari titipan dana zakat masyarakat, sumbangan sosial perorangan, dan dana tanggungjawab sosial perusahaan. Perbandingan di antara Z dan PSR serta CSR dapat mengungkap siapa aktor yang lebih berperan dalam men-sosial-kan kehidupan perekonomian. Apabila $CSR < (Z+PSR)$ berarti sektor rumah tangga (orang perorangan) lebih berperan daripada sektor bisnis (perusahaan-perusahaan). Sebaliknya, jika $CSR > (Z+PSR)$ berarti justru sektor bisnis yang lebih berperan dalam menggerakkan kehidupan sosial. Model makroekonomi konvensional tidak mampu menjelaskan hal ini.

Daftar Pustaka

- Ahmad, A., 1984, "A Macro Model of Distribution in An Islamic Economy", *Journal of Research in Islamic Economics*, Volume 2 No. 1.
- Ahmed, H. (penyunting), 2002, *Theoretical Foundations of Islamic Economics*, Jeddah: IRTI – IDB.
- Al-Jarhi, M.A., 1985, "Towards an Islamic Macro Model of Distribution: A Comparative Approach", *Journal of Research in Islamic Economics*, Volume 2 No. 2.s
- Aknin, L.B. dan kawan-kawan, 2010, "Prosocial Spending and Well-Being: Cross-Cultural Evidence for a Psychological Universal", Harvard Business School.
- Azid, T., 2010, "Anthology of Islamic Economics: Review of Some Basic Issues", *Review of Islamic Economics*, Volume 13 No. 2.
- Barro, R.J. dan Sala-i-Martin, X., 2014, *Economic Growth*, Edisi 2, Cambridge - Massachusetts: The MIT Press.
- Blaug, M., 1998, *Economic Theory in Retrospect*, edisike-5, cetakan-ulang. Cambridge: Cambridge University Press.
- Borghans, L., Duckworth, A.L., Heckman, J.J., dan Weel, B.T., 2008, "The Economics and Psychology of Personal Traits", Bonn: The Institute for the Study of Labor (IZA), *Discussion Paper No. 3333*.
- Choudhury, M.A., 2005, "Islamic Macroeconomics?", *International Journal of Social Economics*, Volume 33 No. 2.
- Çokgezan, M., 2018, "Islamic Economics in Real Life: Do Muslims Give More than the Others?", Paris: HAL Working PaperNo. 01349872.
- Denzin, N.K. dan Lincoln, Y.S. (penyunting), 2009, *Handbook of Qualitative Research*, terjemahan oleh Dariyatmo dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- EC *et al* (European Communities, International Monetary Fund, Organization for Economic Cooperation and Development, United Nations and World Bank), 2009, *System of National Accounts 2008*, New York.
- Eurostat, 2013, *European System of Accounts – ESA 2010*, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Haneef, M.A. dan Furqani, H., 2011, “Methodology of Islamic Economics: Overview of Present State and Future Direction”, *International Journal of Economics, Management & Accounting*, Volume 19 No. 1.
- Ismail, A.G. dan Arshad, N.C., 2009, “Islamic Economic System: From Principles to Microeconomics and Macroeconomics Fields”, Selangor - Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, *Working Paper in Islamic Economics and Finance No. 0911*.
- Kahneman, D., 2003, “A Psychological Perspective on Economics”, *The American Economic Review*, May, Volume 93 No. 2.
- Kahneman, D. dan Tversky, A., 1979, “Prospect Theory: An Analysis of Decisions under Risk”, *Econometrica*, Volume 47 No. 2.
- Kendrick, J.W., 2008, “National Income and Product Accounts”, *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Thomson Gale (internet), <http://www.encyclopedia.com> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2017).
- Khan, M.F., 1984, “Macro Consumption Function in an Islamic Framework”, *Journal of Research in Islamic Economics*, Volume 1 No. 2.
- , 2013, “Theorizing Islamic Economics: Search for a Framework for Islamic Economic Analysis”, *JKAU Islamic Economics*, Vol. 26 No. 1.
- Lunati, M.T., 1997, *Ethical Issues in Economics – From Altruism to Cooperation to Equity*, London: Macmillan Press Ltd.
- Mahomedy, A.C., 2016, “When Economics Neglected Epistemics: How Islamic Economics was Implicated”, *SAEF Working Paper No. 2016/01/14*, December.
- Nienhaus, V., 2013, “Method and Substance of Islamic Economics: Moving Where?”, *JKAU Islamic Economics*, Volume 26 No. 1.
- Rabin, M., 2002, “A Perspective on Psychology and Economics”, *European Economic Review*, Volume 46, Elsevier.
- Shinsuke, N., 2012, “Critical Overview of the History of Islamic Economics: Formation, Transformation, and New Horizon”, *Asian and African Area Studies*, Volume 11 No. 2.
- Webb, R., 1986, “The National Income and Product Accounts”, *Economic Review*, Federal Reserve Bank of Richmond.
- Wickens, M., 2008, *Macroeconomic Theory – A Dynamic General Equilibrium Approach*,

Princeton and Oxford: Princeton
University Press.

Williamson, S.D., 2008,
Macroeconomics, edisi 3.
Boston: Pearson Education Inc.

Zaman, A., 2009, "Islamic Economics: A
Survey of the Literature",
Islamic Studies, Volume 48
Issue 3.

-----, 2018, "Islam versus
Economics", *Handbook on
Islam and Economic Life*,
Research Gate, February.

Zarqa, M.A., 200,. "Method and
Substance of Islamic
Economics: Moving
Where?", *JKAU Islamic
Economics*, Volume 26 No. 1.